

PROSIDING

Seminar Nasional
“Manajemen Informasi Perpustakaan
pada Era Digital”

Padang, 27 April 2017



Diselenggarakan oleh
Program Studi D3 Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan
Program Studi S1 Perpustakaan dan Ilmu Informasi
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang

ERA DIGITAL ISU YANG MENGIKUTINYA

Ardoni
(Dosen Program Studi Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan
FBS Universitas Negeri Padang)
ardoniyonas@gmail.com

Abstrak

Bagi perpustakaan, era digital adalah harapan akan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan pengelolaan informasi. Era digital juga kegundahan akan hilangnya eksistensi perpustakaan atau sekurang-kurangnya penurunan makna perpustakaan. Kenyataannya isu yang mengemuka memberikan gambaran bahwa era digital belum dipahami sepenuhnya. Isu-isu itu antara lain penggunaan istilah, dunia tanpa kertas, plagiarisme, dan pengurangan jumlah pustakawan yang dibutuhkan. Diskusi tentang isu-isu tersebut dapat dijadikan arah bagi peningkatan kepercayaan diri, kinerja, kreativitas, dan atau kemampuan pustakawan.

Kata kunci: Era Digital; Isu-isu; eksistensi perpustakaan.

Pendahuluan

Teknologi informasi sudah merasuk ke hampir semua aspek kehidupan. Misalnya, pada aspek sosial, teknologi informasi bahkan secara perlahan namun pasti mengubah perilaku sosiologis. Di berbagai tempat berkumpul masyarakat, seperti warung, kampus, sekolah, rumah sakit dengan mudah dapat dijumpai sekelompok orang duduk bersama, tetapi hampir tidak ada interaksi antarindividu; semua orang sibuk dengan *gadget* yang dipencet dan disentuh untuk berkomunikasi dengan orang lain yang sedang berada "entah di mana", alih-alih mempedulikan orang-orang di sekitarnya.

Teknologi informasi pulalah yang menyediakan wadah bagi orang-orang untuk memperlihatkan "kemampuannya" dalam bidang politik, agama, ilmu pengetahuan, kekayaan, dan sebagainya. Teknologi informasi menyediakan "kedai" daring yang membuat manusia mudah berbelanja, memesan tiket pesawat, memesan hotel, dan sebagainya, lalu membayarnya melalui fasilitas *internet banking*. Teknologi informasi membuat batas antarruang dan antarwaktu menjadi hilang; dunia menjadi "kecil" di dalam genggamannya manusia.

Perpustakaan sebagai lembaga pengelola sumber informasi tentu tidak dapat menghindari "invasi" teknologi informasi. Berbagai isu (atau bisa disebut

"mitos") mengikuti aplikasi teknologi informasi di perpustakaan. Salah satu isu itu adalah bahwa perpustakaan berpotensi menjadi lembaga yang akan digantikan oleh internet; informasi tidak perlu lagi dikumpulkan, berada, ditelusur, dan dilestarikan di perpustakaan, melainkan cukup dengan internet dengan segala kemudahannya akan berperan menjadi perpustakaan maya.

Selain isu-isu tersebut, perlu pula didiskusikan perubahan yang perlu dilakukan di perpustakaan dalam era digital. Perubahan mencakup seluruh aspek yang ada di perpustakaan, termasuk perubahan cara pandang pemustaka, pustakawan, dan pimpinan lembaga induk serta perubahan sistem layanan perpustakaan. Untuk pustakawan, perubahan tidak hanya diperlukan dalam hal cara pandang, melainkan juga peningkatan kemampuan dan keterampilan.

Isu-Isu Aplikasi Teknologi Informasi di Perpustakaan Perpustakaan Digital versus Automasi Perpustakaan

Penggunaan istilah-istilah dalam aplikasi teknologi informasi di perpustakaan seringkali rancu. Tidak sedikit pimpinan lembaga induk serta pimpinan dan staf perpustakaan yang menggunakan istilah perpustakaan digital secara tidak tepat. Perpustakaan digital didefinisikan sebagai perpustakaan yang memiliki koleksi elektronik serta sarana untuk mengelola, menyimpan, menelusur, dan memperoleh file dan media yang tersimpan dalam koleksi elektronik tersebut (Witten, Bainbridge, & Nichols, 2009). Koleksi elektronik memuat bahan pustaka yang berbeda dari bahan pustaka tercetak, mikroform, atau media lain. Koleksi elektronik yang mencakup teks, visual, audio, atau video yang tersimpan di dalam file-file terbaca komputer.

Kerancuan menjadi masalah ketika di dalam dokumen perencanaan yang disusun oleh pengambil keputusan tingkat pusat (kementrian) tertera istilah pembangunan perpustakaan digital yang diterjemahkan oleh pimpinan lembaga induk (misalnya kepala sekolah, direktur, atau rektor) sebagai perpustakaan yang dilengkapi dengan peralatan komputer untuk menemubalikkan, mengadministrasikan sirkulasi, atau mengolah bahan pustaka. Padahal istilah yang semestinya digunakan adalah perancangan sistem automasi perpustakaan yang didefinisikan sebagai (Levine-Clark & Carter, 2013):

the use of computers and other technologies by a library to support its systems and services and/or the conversion of a library's procedures from manual to computerized, such as from a card catalog to an OPAC,

or from manual circulation cards to an integrated library system (penggunaan komputer dan teknologi lain oleh perpustakaan untuk mendukung sistem dan layanan dan/atau konversi prosedur perpustakaan dari manual ke komputerisasi, seperti dari katalog kartu ke OPAC, atau dari kartu sirkulasi manual ke sistem perpustakaan terpadu).

Kedua istilah tersebut berbeda adanya, walaupun berpeluang digunakan secara bersamaan di perpustakaan. Perpustakaan digital adalah tentang koleksi atau bahan pustaka, sedangkan automasi perpustakaan adalah tentang prosedur layanan perpustakaan. Bagaimanapun, automasi perpustakaan dapat diterapkan di perpustakaan yang sama sekali tidak memiliki koleksi digital; sebaliknya perpustakaan digital akan sangat sulit dilayankan secara manual, tanpa automasi perpustakaan.

Dunia Tanpa Kertas

Istilah "dunia tanpa kertas" (disingkat DTK) merupakan terjemahan bebas dari *paperless society* yang diformulasikan oleh Lancaster (1978). Konsep DTK dimaknai sebagai komunikasi berbasis kertas (dokumen tertulis, surat, dan sebagainya) digantikan oleh komunikasi dan penyimpanan elektronik. Di perpustakaan, konsep tersebut diejawantahkan menjadi perpustakaan digital, yakni perpustakaan yang memiliki koleksi atau bahan pustaka dalam bentuk elektronik, alih-alih tercetak. Benarkah kertas akan "dihabisi" oleh elektronik?

Secara sederhana, konsep DTK dengan mudah dibantah, yakni dengan mempertanyakan bisakah seorang mahasiswa menerima ijazah dalam bentuk elektronik yang tersimpan di dalam CD-ROM, bisakah surat-surat tanah dalam bentuk elektronik menjadi bukti kepemilikan tanah, bisakah sejarah penyakit seorang pasien dicatat di dalam komputer tanpa kertas sama sekali? Jawabannya adalah tidak! Alasan yang paling mendasar adalah tidak pastinya keaslian dokumen elektronik karena terjadinya perubahan yang dilakukan terhadap dokumen tidak dapat diketahui atau dideteksi. Dokumen elektronik perlu digunakan secara bersama-sama dengan dokumen tercetak (A Sample Health Record, 2009).

Para pendukung konsep DTK dapat membantah balik dengan mengatakan, bahwa untuk bidang arsip dan media kertas tak akan tergantikan. Akan tetapi untuk perpustakaan, kertas akan menjadi sejarah, lalu secara berangsur-angsur

perpustakaan pun ditinggalkan oleh pemustaka. Padahal, DTK secara mutlak tidak mungkin terjadi di perpustakaan. Mengapa?

Salahuddin, Manajer Pusat Dokumentasi Solo Post –surat kabar nomor satu di Solo– mengakui adanya perubahan perilaku pengguna informasi di era digital (temu ramah tanggal 26 Februari 2017 di kantor Solo Post, Solo). Perubahan perilaku pengguna informasi yang lebih menyukai informasi serta-merta (*instant information*) yang cepat dan mudah diakses. Namun, perubahan itu tidaklah berarti pengguna informasi lebih menyukai informasi dalam bentuk elektronik karena dalam beberapa hal, justru informasi dalam bentuk tercetak lebih memenuhi kebutuhan pengguna informasi. Salah satu alasan sederhana adalah informasi tercetak tidak tergantung pada kecepatan jaringan internet, tidak tergantung pada kuota jaringan, serta tidak tergantung pada kapasitas baterai *handphone*. Sampai saat ini, Solo Post edisi daring dikunjungi oleh sekitar 300.000 orang per hari, sementara Solo Post berbasis kertas dicetak sekitar 60.000 eksemplar per hari.

Plagiarisme

Pengertian plagiarisme menurut [*Random House Compact Unabridged Dictionary*](#) (Stepchyshyn & Nelson, 2007) adalah “*use or close imitation of the language and thoughts of another author and the representation of them as one's own original work* [penggunaan atau penjiplakan baik dalam hal bahasa dan pemikiran seseorang penulis yang direpresentasikan oleh orang lain seakan-akan hasil karyanya sendiri].” Dalam pengertian demikian, pelaku plagiarisme adalah si “orang lain”. Pengertian lebih luas adalah pengutipan atau penulisan kembali ide seseorang oleh pelaku plagiarisme tanpa menyebutkan nama dan/atau karya pemilik ide, baik dalam sitiran maupun dalam daftar pustaka karya tulis si pelaku.

Pendapat yang berkembang adalah bahwa tindakan plagiarisme dianggap akan lebih marak ketika perpustakaan menyediakan bahan pustaka digital. Alasannya, sumber-sumber informasi digital dengan mudah disalin-tempel (*copy-paste*) dan/atau digandakan ke media lain seperti *flashdisk* dibandingkan sumber-sumber informasi tercetak. Kemudahan itu juga didukung oleh tersedianya fasilitas internet yang dapat diakses melalui media seperti *handphone*.

Berbeda dari itu, ternyata hasil survei The Health Informatics Department, Universitas Illinois menemukan bahwa terhadap sumber-sumber tercetak, 38% plagiarisme dilakukan oleh mahasiswa S1 dan 36% plagiarisme dilakukan oleh mahasiswa S2; terhadap sumber-sumber tercetak, 25% plagiarisme dilakukan oleh

mahasiswa S1 dan 24% plagiarisme dilakukan oleh mahasiswa S2 (The University of Illinois. The Health Informatics Department, [s.a]). Hasil survei menunjukkan bahwa justru sumber-sumber informasi tercetak yang lebih banyak mengalami plagiarisme. Plagiarisme terhadap sumber-sumber informasi elektronik (terutama yang terdapat di internet) akan lebih mudah dideteksi ketika karya tulis yang memuat hasil plagiarisme diunggah ke internet. Perlu dicatat, di lembaga-lembaga perguruan tinggi pengunggahan karya tulis ilmiah ke internet mulai dijadikan kewajiban bagi setiap penulis.

Hasil survei S2 (The University of Illinois. The Health Informatics Department, [s.a]) menemukan bahwa penyebab plagiarisme dilakukan adalah karena beberapa hal. Penyebab-penyebab itu adalah peserta didik tidak tahu cara menyitir, ragu dengan kebenaran pekerjaan sendiri, tidak tahu cara meneliti, tidak mengerti konsep plagiarisme, tidak mengetahui standar etika, tidak merasa bersalah menggunakan karya orang lain tanpa menyebut orang lain itu, tidak memahami tujuan pendidikan, dan terakhir, plagiarisme merupakan bahagian dari budaya. Terlihat bahwa tidak satupun tindakan plagiarisme disebabkan oleh jenis sumber informasi, elektronik atau tercetak.

Pengurangan Tenaga Pustakawan

Kehadiran teknologi informasi di perpustakaan ditengarai akan mengurangi kebutuhan terhadap ketersediaan tenaga pustakawan. Tidak sedikit pimpinan lembaga induk (bahkan pustakawan sendiri) yang berpendapat demikian. Alasannya, komputer sebagai ujung tombak teknologi informasi mampu mengolah data dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu sangat cepat, dan tentu saja hasilnya akurat.

Layaknya mesin, komputer tidak akan mampu melakukan apapun tanpa dikendalikan manusia. Artinya, komputer tetap memerlukan manusia dalam bekerja. Tetapi, bukankah beberapa aturan dan prosedur kerja sudah direkam ke ingatan (*memory*) komputer oleh para pemrogram, sehingga manusia yang mengendalikan/mengoperasikan komputer berkurang beban kerjanya? Jadi, adanya komputer akan mengurangi tenaga manusia untuk mengetahui, mengingat, dan melaksanakan aturan dan prosedur kerja. Dengan kata lain, adanya komputer akan mengurangi jumlah tenaga kerja manusia yang dibutuhkan.

Tidak ada yang salah dari pernyataan bahwa jumlah tenaga kerja manusia akan berkurang ketika komputer diterapkan di sebuah lembaga, termasuk

perpustakaan. Pernyataan itu juga didukung oleh prinsip bahwa "setiap pekerjaan yang berulang-ulang yang tidak menambah pengetahuan/keterampilan adalah bukan pekerjaan manusia, melainkan pekerjaan mesin". Prinsip itu berlaku misalnya untuk pekerjaan "mengabjad" katalog kartu yang dapat digantikan oleh komputer atau pekerjaan mengetik katalog kartu yang dulu dilakukan secara berulang-ulang sesuai jumlah katalog kartu untuk sebuah judul bahan pustaka.

Dengan memandang bahwa pustakawan bukanlah hanya tenaga terampil dan pekerjaan kepustakawanan tidak teknis belaka, penggantian pustakawan oleh komputer tidak akan pernah terjadi. Kehadiran komputer di perpustakaan justru akan meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan kepustakawanan dalam arti sebenarnya, sehingga pustakawan layak menjadi salah satu tenaga fungsional, bukan tenaga teknis. Pustakawan bukan hanya pelaksana, melainkan juga perencana, pemikir, perancang, dan pengevaluasi. Selama ini, banyak pekerjaan kepustakawanan yang jarang dilakukan karena pustakawan "sibuk" melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mestinya dilakukan oleh mesin komputer. Salah satu contoh pekerjaan itu adalah melakukan survei atau kajian terhadap pemustaka, sehingga pustakawan dapat menyediakan bahan pustaka dan layanan sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Pustakawan di Era Digital

Dari paparan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan digital tidaklah berarti meniadakan bahan pustaka tercetak, audio, visual, dan bahan pustaka "konvensional" lainnya. Bahan pustaka digital tetap saja perlu dilengkapi dengan bahan pustaka konvensional, seperti bahan pustaka tercetak. Sebagai perbandingan, surat kabar daring sangat jarang yang memuat informasi selengkap surat kabar tercetak.

Buku-buku elektronik tidaklah secara mudah dan murah bisa diperoleh. Biaya langganan jurnal elektronik pun sangat mahal, ratusan juta rupiah untuk langganan satu tahun. Tanpa ratusan juta rupiah, akses terhadap bahan pustaka tersebut hanya bisa dilakukan manakala bahan pustaka itu sudah dianggap kadaluarsa.

Bagaimanapun, jumlah buku dan jurnal elektronik yang dapat dijadikan koleksi perpustakaan digital adalah jauh melebihi jumlah buku dan jurnal tercetak yang selama ini dikoleksi oleh perpustakaan. Banyaknya jumlah buku dan jurnal itu bermuara pada kesulitan memilah buku dan artikel yang sesuai dengan kebutuhan

pemustaka. Kesulitan itulah yang semestinya dipermudah oleh pustakawan dengan membantu pemustaka menelusurinya. Tidak itu saja, pustakawan juga bisa berperan sebagai konsultan bagi pemustaka dalam memanfaatkan sumber informasi (elektronik atau tercetak). Konsultasi dimaksud erat kaitannya dengan kemampuan literasi informasi yang diperlukan karena rendahnya kemampuan itu akan membuat pemustaka menggunakan dan mempercayai informasi yang bisa saja tidak pasti kebenarannya.

Era digital adalah juga peluang bagi pustakawan menyediakan layanan yang selama ini jarang dilakukan karena cukup sulit, misalnya jasa kesiagaan informasi (*CAS = current awareness services*) atau penyebaran informasi terseleksi (*SDI = selective dissemination of information*) yang merupakan konsep layanan yang dicetuskan oleh Hans Peter Luhn di tahun 1950-an (Connor, 1967; Hensley, 1963). Layanan tersebut pernah dilakukan oleh PDII-LIPI di tahun 1990-an dengan menyediakan daftar isi majalah ilmiah untuk dilanggan secara berbayar oleh perpustakaan-perpustakaan; ketika pemustaka memerlukan salah satu artikel di dalam daftar isi itu, pustakawan akan memesan artikel tercetaknya ke PDII-LIPI dan dikirim melalui jasa pos.

Di era digital, layanan tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yakni internet. *CAS* atau *SDI* dapat dilayankan dengan mengirimkan metadata (data bibliografis) buku atau jurnal ilmiah (tercetak dan elektronik) kepada pemustaka melalui surel (*e-mail*). Kata *selective* tidak lagi sekadar per perpustakaan, melainkan per pemustaka, sehingga benar-benar menjadi *selective*. Layanan ini memerlukan pustakawan yang proaktif (tidak hanya wacana) menghubungi pemustaka untuk memperoleh informasi tentang bidang ilmu (bahkan subbidang ilmu) yang diminatinya. Manakala pemustaka menginginkan salah satu bahan pustaka (sesuai metadata yang dikirimkan pustakawan), pustakawan dapat mengirimkannya melalui internet pula. Bukankah kunjungan di era digital tidak harus berarti kunjungan secara fisik?

Pustakawan di era digital dapat memenuhi konsep *magnitude* (ukuran), *proximity* (kedekatan), *prominent* (menonjol), *actuality* (terbaru), *human interest* (minat masyarakat). Konsep itu sendiri dikemukakan oleh Salahuddin, Manajer Pusat Dokumentasi Solo Post. Perpustakaan pun bisa menyebutkan slogan sesuai konsep itu, seperti dinyatakan oleh Alda, Humas Solo Post, yakni slogan *palugada* (*apa lu mau gua ada*). Tentu saja, pustakawan perlu meningkatkan kompetensinya, terutama dalam bidang bahasa dan teknologi informasi dan "rela" memberitahu

pemustaka (potensial), tentang layanan yang bisa dikerjakan dan diberikannya kepada pemustaka.

Seiring dengan itu semua, masalah klasik perpustakaan yakni pandangan pimpinan lembaga yang berimbas pada alokasi dana untuk perpustakaan perlu diselesaikan. Pimpinan lembaga semestinya memandang perpustakaan tidak sekadar "pelengkap penderita" yang diperlukan untuk akreditasi dan peringkat semata, melainkan sebagai pusat sumber informasi bagi anggota lembaganya. Pimpinan lembaga, kemudian, mengalokasikan dana yang lebih banyak bagi perpustakaan setelah pustakawan meyakinkannya bahwa pustakawan bisa menghasilkan keuntungan bagi lembaga melebihi nilai dana yang dialokasikan itu.

Penutup

Era digital adalah era yang seringkali diiringi oleh isu atau mitos yang perlu dikaji ulang dan didiskusikan. Hasil kajian dapat berimbas terhadap perubahan dan peningkatan kinerja pustakawan dan keberartian perpustakaan. Era digital bukanlah era yang perlu "dicurigai" akan menghapus pustakawan dan sumber informasi nondigital dari sejarah. Dunia tidak mengenal angka 100% alias mutlak dalam kasus apapun, sehingga tidak akan pernah ada digital mutlak bagi informasi dan sumber informasi.

Era digital justru perlu dimanfaatkan untuk menyulam pekerjaan kepustakawanan menjadi semakin berbunga-bunga dan menyenangkan untuk digeluti seraya berupaya meningkatkan kemampuan diri untuk menghadapinya. Era digital adalah peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Taala bagi manusia yang berkenan memanfaatkannya. Era digital adalah era di saat manusia saat ini berada dan hidup di dalamnya. Syaratnya? Jangan hidup di era digital dengan cara berpikir manual.

Daftar Rujukan

- A Sample Health Record. (2009). *NIH MedlinePlus, Summer 2009 Volume 4 Number 3*, 17.
- Connor, J. H. (1967). Selective Dissemination of Information: a Review of the Literature and the Issues. *The Library Quarterly: Information, Community, Policy Vol 37, No. 4 (Oct, 1967)*, 373-391.
- Hensley, C. B. (1963). Selective Dissemination of Information (SDI): state of the art in May, 2009. *AFIPS '63, Proceedings of the May 21-23, 1963. AFIPS '63*,

Proceedings of the May 21-23, 1963 (hal. 257-262). Detroit, Michigan: Spring Joint Computer Conference.

Lancaster, F. W. (1978). *Toward Paperless Information Systems (Library Information System)*. New York: Academic Press.

Levine-Clark, M., & Carter, T. M. (2013). *ALA Glossary of Library and Information Science, Fourth Edition*. Chicago: ALA.

Stephyshyn, V., & Nelson, R. S. (2007). *Library Plagiarism Policies*. Chicago: American Library Association.

The University of Illinois. The Health Informatics Department. ([s.a]). *The Reality and Solution of College Plagiarism*. Retrieved April 15, 2017, from The Health Informatics Department:

<http://healthinformatics.uic.edu/resources/infographics/the-reality-and-solution-of-college-plagiarism-infographic/>

Witten, I., Bainbridge, D., & Nichols, D. (2009). *How to Build a Digital Library*. Massachusetts: Morgan Kaufmann.